

DINAMIKA POLITIK PEMBANGUNAN PADA MASA ORDE BARU (Studi Tentang Industrialisasi Ketergantungan dan Peran Modal Jepang)

Beby Masitho

Email : politikbeby@yahoo.co.id

Jl. Kolam No. 1 Medan Estate, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL

Universitas Medan Area

Diterima 5 Agustus 2013/ Disetujui 26 Agustus 2013

Abstract

Politic development Indonesia country at Orde Baru time to create industrialization hanging down, cause any problem can not to completion by Soeharto Politic rezim to manage development project/ industrialization, inter problem is economy domestic structure to colonial inheritance, so that industrial aspec, to be come problem at powerless existantion bourgeois class in domestic. Horizontal design from grouping in base culture for line (social stratification based on ethnic line). Lame character indutry structure with weaknes existance manufacture sectore cause high hanged at nature source, as expore comodity and last domination strange capital in industry activity that productive.

Keywords : Industrialization, Politic development.

Abstrak

Dinamika politik pembangunan di indonesia pada masa Orde Baru yang menciptakan ketergantungan industrialisasi disebabkan beberapa masalah utama yang tidak dapat diselesaikan rezim politik Soeharto dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan/industrialisasi. Masalah diantaranya adalah Struktur ekonomi domestik yang diwarisi dari era kolonial, sehingga dari segi industri, hal ini menjadi problem dengan melemahnya eksistensi golongan borjuis di dalam negeri. Polarisasi horizontal yang terdiri dari pengelompokkan (grouping) di dalam entitas-entitas kultural didasarkan oleh garis (stratifikasi sosial didasarkan atas garis etnis), tumpang tindih sifat struktur industri dengan lemahnya keberadaam sektor manufaktur, yang menyebabkan tingginya ketergantungan pada sumber daya alam sebagai komoditas ekspor. Dan yang terakhir dominasi modal asing dalam aktivitas-aktivitas industri yang produktif.

Kata kunci : Industrialisasi, Pembangunan politik

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia, dihuni lebih dari 220 juta penduduk. Luas geografisnya terdiri dari 14.000 pulau yang tersebar sepanjang 3000 mil dengan daratan $\frac{3}{4}$ dari 1 juta mil persegi. Sumber alamnya yang melimpah tentunya menarik perhatian pihak-pihak asing. Situasi politik di indonesia tergantung rezim yang sedang berkuasa. Orde baru merupakan rezim yang kedua dengan jangka waktu berkuasa cukup lama di Indonesia. Rezim ini dipimpin oleh Soeharto yang membawa demokrasi pancasila

dalam kekuasaannya. Ternyata demokrasi pancasila hanya sebagai simbolis dari rezim ini, aktualisasi kekuasaan rezim ini adalah otoritarianisme yang mengacu kekuasaan pada satu orang yaitu Soeharto.

Pemerintahan Soeharto mencari legitimasinya dengan janji tentang pembangunan ekonomi. Kata “pembangunan” menjadi poin sentral rezim Orde Baru untuk membedakannya dengan Orde Lama Soekarno. Pembangunan mulai menjadi sebuah “ideologi” baru yang dikampanyekan oleh para pejabat pemerintah selama Orde Baru, yang memberikan legitimasi bagi hampir

semua langkah kebijakan dan tindakan pemerintah. Hal ini berjalan seiring dengan propaganda negara tentang UUD 1945 dalam semua aspek kehidupan sosial-politik. Pembangunan dipandang sebagai cara paling benar untuk mengimplementasikan pancasila, begitu rupa sehingga setiap orang di negeri ini wajib mendukungnya.

Untuk menangani ekonomi, Soeharto merekrut para ekonom sipil dari Universitas Indonesia yang kemudian populer disebut sebagai “teknokrat”. Ideologi utama para teknokrat ini adalah prinsip-prinsip ekonomi ortodoks atau lazim disebut ekonomi-neo klasik, yang melihat keharusan untuk mengoptimalkan operasi pasar dan meminimalkan peran negara dalam bidang ekonomi. Akan tetapi, dalam tingkat yang cukup signifikan, mereka juga setuju dengan prinsip-prinsip *Keynesian* yang cenderung mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi berdasarkan indikator-indikator GNP. Intervensi negara, menurut pandangan ini, penting untuk mengakselerasikan proses industrialisasi. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mengembangkan sektor industri, selalu harus tinggi, karena pembangunan sektor industri dipandang perlu untuk memberikan dorongan yang besar bagi seluruh gerbong pembangunan ekonomi.

Garis pemikiran ini secara langsung didukung oleh teori “*The Take-Off into Self-Sustained Growth*” oleh *W.W.Rostow*. *Rostow* melihat bahwa semua masyarakat akan melewati lima tahap perkembangan dari masyarakat tradisional sebagai pra-kondisi untuk tinggal landas, tinggal landas, tahap pematangan dan akhirnya masuk ke tahap konsumsi massal. Sebagai sebuah negara berkembang, posisi Indonesia, menurut pandangan ini, ada di dalam tahap kedua atau transisi dari tradisional menuju tahap tinggal landas (*take-off*). Keberadaan para pengusaha yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan produktivitas pertanian, serta pembangunan infrastruktur menjadi sangatlah

penting untuk mengakselerasikan proses ini dan kemudian masuk ke tahap *take-off*. Dalam logika pemikiran ini, peran pemerintah menjadi keharusan yang tak terelakkan untuk mempercepat proses pembangunan Perumusan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) Jelas mendapat pengaruh dari pemikiran *Rostow*.

Dalam artian yang lebih struktural, ideologi campuran seperti ini secara aktual mewakili basis sosial-politik rezim Orde Baru itu sendiri. “ideologi” ekonomi neo-klasik mencerminkan elemen-elemen kepentingan kaum borjuis domestik dan internasional. Terutama perusahaan-perusahaan transnasional (TNC) dan mitra mereka di Indonesia yang kepentingannya adalah mengembangkan modal di negeri ini dan memperoleh surplus ekonomi dari usaha mereka. Sebagai hasilnya, strategi pembangunan ekonomi yang dipilih oleh rezim Orde baru tidak selalu konsisten mendasarkan diri pada mekanisme pasar yang murni terbuka dan *fair*.

Masuknya modal-modal asing di Indonesia membuat industrialisasi di Indonesia menjadi ketergantungan. Salah satu modal terbesar yang masuk ke Indonesia adalah Jepang. Sejak akhir 1960-an Jepang telah menjadi negara yang paling penting dalam hal investasi modal di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Perusahaan-perusahaan transnasional (TNC) Jepang telah merelokasikan industri-industri mereka di kawasan ini terutama dalam rangka memangkas biaya tenaga kerja dan tekanan Amerika Serikat yang menghendaki Jepang mengurangi surplus perdagangannya yang terlalu besar dalam perdagangan bilateralnya dengan Amerika Serikat. Kebijakan-kebijakan pemerintah Jepang memainkan peran strategis dalam mendorong TNC Jepang untuk melakukan investasi dan relokasi industri mereka ke Asia Tenggara.

METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan dengan pendekatan sejarah. Fokus kepada dinamika industrialisasi yang bergantung pada masa Orde Baru. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) dan dokumen. Analisis dilakukan dengan metode analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

Industrialisasi yang Bergantung dari Penghujung 1960-an sampai era 1970-an

Awal mula pemerintah Orde Baru meletakkan peran modal asing untuk menstabilkan perekonomian Indonesia, dengan mengundang kembali mereka untuk masuk melalui kebijakan-kebijakan liberalisasi. Tujuan mendesaknya kebijakan-kebijakan liberalisasi pemerintah adalah untuk memulihkan lagi sistem produksi. Undang-undang Investasi Asing tahun 1967 terdiri dari insentif-insentif *holiday* dan bebas bea masuk untuk mesin-mesin dan alat-alat produksi lainnya selama tahun-tahun pertama produksi. Sebagaimana disebut dalam pasal 21 UU ini, perusahaan-perusahaan asing mendapat jaminan pemerintah untuk tidak dinasionalisasikan di masa depan. Selama tiga putaran REPELITA pemerintah membangun industri-industri substitusi impor untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, dengan maksud mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor.

Tendensi kepada strategi substitusi impor untuk sebagian didasarkan pada keyakinan bahwa jumlah penduduk yang demikian besar merupakan pasar potensial dan juga ketersediaan bahan mentah bagi industri modern karena Indonesia amat kaya akan sumber alam. Juga diyakini bahwa strategi membantu pengembangan sektor manufaktur, disamping mengurangi defisit neraca pembayaran dan menghemat devisa.

Meningkatnya ketergantungan pada sumber-sumber dana asing selama masa-masa awal Orde Baru dapat dilihat dalam fakta bahwa masa tiga-perempat REPELITA I (1964-1974) didanai oleh pinjaman asing, yang tumbuh hingga US\$ 877 juta di tahun terakhir (1974). Memasuki tahun 1972, hutang asing baru sejak 1966 telah melebihi semua hutang luar negeri yang diwariskan oleh pemerintahan Soekarno berbeda dengan apa yang semula diharapkan, ada juga tendensi meningkatnya ketergantungan dalam proses produksi dan bahan mentah. Hal ini dapat dilihat dalam meningkatnya impor bahan mentah selama era 1970-an. Nilai impor bahan mentah meningkat dari US\$ 1,191 milyar (25,5 persen) di tahun 1975 menjadi US\$ 3,572 milyar (44,0 persen) di tahun 1981. Selama periode 1970-an, kontribusi sektor industri (terutama manufaktur) dalam membuka kesempatan kerja juga relatif kecil. Sektor manufaktur hanya dapat menyerap 2.949.600 pekerja, yang artinya 7,8 persen dari total angkatan kerja di tahun 1971, dan 4.360.700 yang berarti hanya 8,6 persen dari total angkatan kerja di tahun 1980.

Kecenderungan pemerintah untuk mengadopsi prinsip-prinsip sistem ekonomi pasar di tahun-tahun awal era Orde Baru punya korelasi langsung dengan upaya-upaya untuk meyakinkan negara-negara donor serta investor asing lainnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, di awal tahun 1974, ketika pemerintahan mendapatkan penerimaan yang berlimpah dari sektor ekspor, ide bahwa negara dapat memainkan peran lebih besar dalam perekonomian mulai bermunculan ketika negara mendapat penerimaan dari sektor minyak sebagai basis modalnya yang kuat.

Sementara itu, kebijakan pemerintahan yang menetapkan suku bunga tinggi untuk menghambat laju inflasi membuat pengusaha pribumi berada dalam posisi tanpa akses pada modal asing sehingga mereka merasa kecewa

berat. Mereka mendapati diri tersingkir dalam dunia bisnis yang secara tradisional menjadi milik mereka misalnya bisnis tekstil, minuman ringan, rokok kretek, oleh etnis cina dan kompetitor asing dengan akses pada dana yang lebih mudah. Maka, para pengusaha pribumi yang juga anti komunis serta dekat dengan lingkaran islam yang taat, dengan demikian menjadi bagian yang pertama dalam koalisi pendukung Soeharto mulai ragu apakah kepentingan mereka akan diperhatikan oleh rezim Orde Baru.

Industrialisasi yang Bergantung dari Periode 1980

Di Asia Tenggara, para investor jepang lebih tertarik untuk menanamkan investasinya di bidang sumber daya alam, karena kekayaan kawasan ini akan sumber daya alam. Selain itu mereka juga tertarik pada bidang ekspor manufaktur karena rendahnya upah buruh di Indonesia. Sejak peristiwa malari 1974, jepang cenderung lebih bersikap *low profile* terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah indonesia. Tetapi, di awal tahun 1980, jepang mulai berani menyuarakan kekecewaan terhdap kebijakan-kebijakan investasi pemerintah Indonesia. Hal ini menambah beban pemerintah yang begitu membutuhkan investasi dari luar negeri untuk menutupi turunnya pendapatan yang diperoleh dari sektor minyak. Melalui serangkaian kebijakan dan regulasi dan debirokratisasi, strategi yang berorientasi ekspor sebagai pengganti substitusi impor yang lama, dipromosikan dalam periode ini.

Dalam keadaan seperti ini, para pengusaha manufaktur jepang, mulai menjalankan investasi yang berorientasi ekspor di Indonesia di awal tahun 1980-an ketika biaya produksi di jepang meningkat dan evaluasi mata uang yen memaksa mereka untuk mencari basis di luar negara itu. Investasi jepang pun meningkat 3 kali lipat dari US\$ 55,406 jutadi tahun 1980 menjadi US\$ 153,52 juta di 1981. Dan pada tahun 1982, meningkat lagi tiga kali lipat menjadi

US\$ 511,586 juta. Bahkan tahun 1986, jepang menanam hampir 40% dari total investasinya di Indonesia. Saham tersebut tetap bertahan sebesar 36,5 %

Pemerintah Jepang memutuskan untuk membantu perekonomian Indonesia di pertengahan tahun 1980an dengan menyediakan bantuan khusus dan dengan cepat mengeluarkan dana untuk meringkankan tekanan pada neraca pembayaran dan anggaran belanja yang dibutuhkan secepatnya, yang awalnya bertambah ditahun 1980-an dengan menyediakan bantuan khusus dan dengan cepat mengeluarkan dana untuk meringkankan tekanan pada neraca pembayaran dan anggaran belanja yang dibutuhkan secepatnya, yang awalnya bertambah ditahun 1987. Bantuan khusus ini berjumlah US\$1.277,8juta ditahun 1990 atau 1991.

Untuk membantu Indonesia yang sedang manghadapi masalah hutang, jepang menjanjikan dana baru di Indonesia dipertemuan IGGI , juni 1989 namun, implementasi dari janji tersebut tidak begitu kelihatan wujudnya . Oda jepang untuk indonesia ditahun 1990 meningkat kurang dari 5 miliyar yen dibandingkan tahun sebelumnya. Setengah dari 201,1juta yen ODA jepang untuk indonesia merupakan program bantuan yang diberikan dengan cepat, sedangkan setengah lagi untuk dipinjamkan oleh proyek. Sekalipun jepang tampak enggan memenuhi banyaknya permintaan pihak indonesia untuk bantuan ekonomi sebagai mana ditunjukkan oleh ditolakny usulan sumarin, namun semua kenyataan itu sebenarnya hanya menunjukkan kesadaran pemerintah jepang akan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi di indonesia yang mengalami masalah serius sejak pertengahan 1980-an.

Jatuhnya harga minyak diawal tahun 1980- an telah menyebabkan terjadinya resesi ekonomi yang serius di indonesia . Pendapatan yang diperoleh dari minyak turun US\$ 19 miliyar ditahun 1981 atau 1982 menjadi US\$

14,7 milyar ditahun 1982 atau 1983 , dan terus turun hingga US\$ 6.19 juta ditahun 1986 atau 1987. Konsekuensi, neraca pembayaran Indonesia berantakan. Dari surplus senilai US\$ 2 milyar di tahun 1979 atau 1980 dan 1980 atau 1981, jumlah surplus turun hingga hingga US\$ 2,790 juta ditahun 1981 atau 1982, US\$ 7,039 juta 1982 atau 1983 dan US\$ 4.151 juta ditahun 1983 atau 1984. Sekalipun defisit masih terlindungi oleh aset luar negeri yang sehat yang mampu *me-recovery* hingga US\$ 10 milyar menjelang 1984 atau 1985, indonesia dipaksa mengambil pinjaman luar negeri yang lebih banyak . antara 1982 atau 1983 dan 1984 atau 1985 rata- rata kebutuhan eksternal mencapai US\$ 6,2 milyar per tahun. Dari jumlah ini, sebesar US\$ 4,3-nya disalurkan dalam bentuk kredit dan pinjaman jangka menengah dan jangka panjang. Di tahun 1984, total hutang yang dibayar senilai US\$ 28,4 milyar dengan dasar *debt service ratio* sebesar 21,1 persen.

Pukulan berat terhadap perekonomian yang disebabkan oleh turunnya harga minyak memaksa pemerintah untuk menyadari bahwa ekonomi Indonesia tidak bisa terus menerus bergantung pada minyak dan bahwa difersifikasi basis ekspor sangatlah dibutuhkan. Jatuhnya harga minyak juga memperkuat posisi para teknokrat penganut paham ekonomi neo-klasik didalam pemerintahan karena hanya dengan resep kebijakan pro- pasar, modal asing akan mengalir dengan deras lagi ke indonesia guna menghidupkan kembali kesempatan kepada para teknokrat untuk menyusun kebijakan-kebijakan liberalisasi setelah satu dekade kekuasaan itu didominasi oleh kelompok nasionalis.

Menjelang tahun 1980-an, liberalisasi ekonomi mulai mengedepankan kekayaan dan keberhasilan komunitas bisnis etnis cina dan hal itu naik menjadi isu politis yang sensitif. Salah seorang pebisnis kawakan cina, Lim Sioe Liong, bahkan digolongkan sebagai salah satu dari empat pulang orang terkaya di dunia,

yang menjalankan kelompok bisnis yang tersebar dari pantai barat amerika serikat, melewati asia tenggara, hingga eropa.

Industrialisasi yang Bergantung dari Periode 1990

Modal jepang bagi industrialisasi di indonesia selama era Orde Baru dapat dilihat dari kenyataan, bahwa sejak 1967-1997 jepang secara kumulatif adalah investor terbesar di negeri ini, yang nilai investasinya sebesar us\$41,4 milyar yang mencakup 1.004 proyek . dalam dekade 1990-an, menunjukkan bahwa investasi jepang di indonesia terjadi ditahun 1996, yang nilainya sampai us\$1.330 milyar. angka ini juga memperlihatkan bahwa investasi dari jepang pernah mencapai hingga US\$ 5.421 juta ditahun 1997. Yang menarik. Angka ini turun sampai US\$ 1,33milyar ditahun 1998 dan terus turun hingga US\$ 0,44 juta ditahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang berjalan bersama dengan meningkatkan suhu politik telah mengurungkan niat para pengusaha jepang untuk menanamkan modalnya di indonesia.

Arti penting jepang bagi ekonomi indonesia ditahun 1990-an juga dapat dilihat dalam komitmen jepang yang terus-menerus untuk memberikan kebutuhan bantuan ekonomi kepada indonesia melalui IGGI\CGI. Dalam katagori bantuan bilateral, selama periode 1991\1992 hingga 1994\1995 jepang menjadi penyumbangan bantuan asing terbesar bagi indonesia melalui IGGI\CGI. dari total US\$ 5,02 milyar bantuan IGGI\CGI ditahun 1994\1995, misalnya, jepang memberikan us\$ 1,670 milyar untuk mendanai 20 proyek, terdiri dari US\$ 1,5 pinjaman melalui OECF dan US\$ 170 juta hibah dan bantuan teknis. Pada bulan juni 1992, pemerintah jepang meluncurkan piagam ODA (*the ODA charter*) untuk mengklarifikasi filosofi dan prinsip-prinsip dasar ODA, dan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang mampu membuat ODA berfungsi lebih efisien dan efektif.

Piagam tersebut menggaris bawahi mutlak perlunya pertimbangan - pertimbangan kemanusiaan, pentingnya rasa saling ketergantungan, mendesaknya keharusan konservasi lingkungan hidup dan dukungan bagi negara-negara berkembang yang berusaha dengan kekuatan sendiri untuk lepas landas secara ekonomi. Program ini telah mengeluarkan sekitar hampir US\$ 120 juta dalam bentuk kredit, model dan kontribusi kepada lembaga-lembaga keuangan internasional untuk tahun 1993-1997.

PENUTUP

Kesimpulan

Hubungan indonesia jepang oleh tingginya ketergantungan indonesia pada modal, teknologi dan bantuan keuangan jepang. Di sisi lain, ada berapa faktor signifikan yang telah mengurangi sifat – sifat ketergantungan dalam relasi ini. Indonesia selalu penting bagi jepang karena beberapa alasan .kebutuhan jepang akan minyak mentah indonesia sangat tinggi untuk kelangsungan hidup industri- industri di jepang. Bahwa jepang menyerap sekitar 70 persen ekspor minyak indonesia. Jepang juga menjadi konsumen utama kayu *plywood* dari indonesia jampang *plywood* jepang dari indonesia senilai dari US\$ 1 miliar . indonesia ,bersama negara – negara asia tenggara lainnya, telah menjadi tempat tujuan utama bagi relokasi industri – industri jepang. *Last but not least*, sebagai negara dengan penduduk lebih dari 200 juta orang , indonesia merupakan pasar terbesar bagi jepang dikawasan asia tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji (1995), Perusahaan Multinasional : Penanaman Modal Asing, Jakarta : Pustaka Jasa
- Chaniago, Andrinof A. (2001), Gagalnya pembangunan : Kajian Ekonomi Politik Terhadap Akar Krisis di Indonesia, Jakarta, LP3ES
- Cribb, Robert (1998), Indonesia Beyond Soeharto : Polity, economy, Transition, New York, London : M.E Sharpe
- Hakim, Lukman (1993), "Japan - Indonesia Relations and the Oprion for Thechnological Development in Indonesia's Industries", dalam "The Indonesian Quarterly, Vol. XXI, No. 4, Fourth Quarter
- Irwan, Alexander (1999), jejak - jejak krisis di Asia : Ekonomi Politik Industrialisasi, Yogyakarta : Kanisius
- Ramli, rizal (1982), "Industrialisasi di Indonesia : Antara Tujuan dan Kenyataan, dalam : Prisma, No. 12